



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



JUMAT WAGE

11 AGUSTUS 2023 (23 SURTA 1957 / TAHUN LXXVIII NO 301)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN



Presiden Joko Widodo (tengah) bersama para artis memasuki stasiun untuk menaiki LRT Jabodetabek menuju Stasiun Dukuh Atas di Stasiun Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/8/2023).

KR-Antara/Hafidz Mubarak A

Pemerintah Kaji Plus-Minusnya Sistem Zonasi PPDB Dipertimbangkan Dihapus

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemerintah sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau menghapus sistem zonasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“(Sedang) dipertimbangkan. Akan dicek secara mendalam dulu plus-minusnya,” kata Jokowi usai mencoba LRT Jabodetabek di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8).

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Presiden Jokowi tengah mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan. Kebijakan sistem zonasi PPDB telah melenceng dari tujuan awal, karena alih-alih menargetkan pemerataan sekolah unggulan, namun justru menimbulkan masalah hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Muzani mengatakan sistem zonasi PPDB memicu ketidakadilan, sehingga partainya, yaitu Gerindra,

meminta Pemerintah mengevaluasi kebijakan ini. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, sistem zonasi sejatinya lebih bagus dibandingkan kembali pada sistem lama yang telah melahirkan banyak masalah seperti pemalsuan nilai hingga jual beli kursi.

Muhadjir menuturkan, pemberlakuan sistem zonasi memiliki semangat perbaikan, terutama untuk menghilangkan fenomena ‘kastanisasi’ sekolah negeri. Menurutnya, kebijakan itu juga bertujuan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Sementara terkait kecurangan yang muncul dalam PPDB sistem zonasi

bukan karena kesalahan sistem. “Kalau kecurangan numpang Kartu Keluarga (KK) itu kan bukan salahnya sistem, tetapi pengawasannya yang tidak jalan,” kata Muhadjir, Juli lalu.

Untuk mencegah kecurangan, kata Muhadjir, Pemerintah Daerah semestinya dapat mengantisipasi dengan merencanakan dan memetakan jumlah kursi di sekolah negeri, enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Meski demikian, Muhadjir menyatakan tidak masalah apabila ada sebagian pihak yang menilai kebijakan zonasi perlu dievaluasi atau bahkan diganti.

“Kalau mau kembali ke sistem lama silakan. Kalau menurut saya, perbaikilah sistem yang ada ini, silakan diubah kalau sudah tidak cocok dan memang seharusnya begitu, harus selalu ada evaluasi dan perbaikan,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. (Ant/San)-f

TIKET MODA TRANSPORTASI DISUBSIDI Jokowi Ajak Artis Naik LRT

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tiket kereta LRT Jabodetabek, kereta cepat Jakarta-Bandung, MRT, dan sejumlah moda transportasi lainnya akan disubsidi pemerintah. Subsidi tersebut akan diberikan melalui Public Service Obligation (PSO). Pemberian subsidi tersebut agar dapat meringankan harga tiket moda transportasi yang dibebankan ke konsumen.

“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya

Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidi,” kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas Jakarta, Kamis (10/8). Jokowi mencoba kereta LRT Jabodetabek Lintas Bekasi dari Stasiun Jati Mulya Bekasi ke Stasiun Dukuh Atas Jakarta.

Jokowi bersama para artis dan pemengaruh (influencer) tiba di Stasiun Jati Mulya sekitar pukul

08.30 WIB. Setelah naik ke lantai 1 Stasiun Jati Mulya, berdiskusi sejenak dengan para artis sebelum melintasi mesin pemindai kartu elektronik dan menaiki eskalator untuk memasuki gerbong LRT. Artis yang mendampingi Jokowi, antara lain Nirina Zubir, Prisia Nasution, Chelsea Islan, Lukman Sardi, Desta, Cak Lontong, Sari Nila dan lainnya.

Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah ke transportasi massal dari penggunaan kendaraan pribadi. (Ant/Has)-d

Analisis Penghapusan Kredit UMKM

Dr. Suparmono, MSI

PEMERINTAH berencana menghapus kredit macet UMKM di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hal ini mengacu pada melalui UU P2SK Pasal 250 dan Pasal 251 mengatur penghapusbukuan kredit macet kepada UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM. Pemerintah berargumen agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30% di tahun 2024. Padahal selama ini kredit usaha perbankan hanya mencapai 24% bagi pelaku UMKM.

Kebijakan ini tentunya memantik pro dan kontra bila dilihat dari berbagai aspek. Berbeda dengan krisis ekonomi 1998 dimana dampak paling besar dirasakan oleh usaha menengah dan besar, terutama sektor perbankan. Hantaman ekonomi akibat pandemi lebih banyak dirasakan oleh pelaku UMKM, baik yang berorientasi pasar lokal maupun pasar luar negeri. Tidak hanya kesulitan dalam melakukan pemasaran produk,

* Bersambung hal 7 kol 4

TAK TERKAIT ULANG TAHUN AHY MA Tolak Permohonan PK Moeldoko

JAKARTA (KR) - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terhadap SK Menkumham terkait kepemimpinan Partai Demokrat. MA tegaskan penolakan tersebut bebas dari intervensi pihak mana pun.

Hakim Agung dan Juru Bicara MA Suharto menjelaskan bahwa bukti baru atau novum yang diajukan oleh Moeldoko tidak cukup untuk menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan yang diajukan permohonan PK-nya. “Novum yang diajukan para pemohon peninjauan kembali tidak bersifat menentukan sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi,” jelas Suharto dalam jumpa pers di Media Center MA Jakarta, Kamis (10/8).

Suharto menyampaikan hal itu sebagai pendapat majelis hakim dalam menolak

permohonan Peninjauan Kembali (PK) Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terhadap SK Menteri Hukum dan HAM RI terkait kepemimpinan Partai Demokrat. Putusan yang diajukan PK-nya oleh Moeldoko adalah Putusan Kasasi Nomor 487 K/TUN/2022 tanggal 29 September 2022 yang amarnya adalah menolak kasasi.

Pembacaan putusan yang digelar pada hari Kamis tidak berkaitan dengan ulang tahun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjadi pihak tergugat dalam perkara itu. “Jadi, memang jadwalnya sidang hari ini dan putusan hari ini. MA sebagai yudikatif ‘power’ dalam menjalankan pekerjaannya bebas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisial yang lain,” kata Suharto seraya mengingatkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. (Ful)-f

KANWIL KEMENAG DIMINTA MENGAWASI Izin 4 Penyelenggara Umrah Dibekukan

JAKARTA (KR) - Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi untuk mengawasi empat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang izin operasionalnya dibekukan sementara.

“Pastikan PPIU tersebut dalam masa pembekuan dan penghentian sementara kegiatannya tidak menerima pendaftaran dan memberangkatkan jemaah umrah serta larangan atau sanksi-sanksi lainnya yang telah ditetapkan,” ujar Nur Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/8).

Sebelumnya Kemenag membekukan PPIU yang gagal memberangkatkan jemaah umrah yakni PT Amana Berkah Mandiri, PT Arafah Mina, PT Mubina Fifa Mandiri dan PT Arafah Medina Jaya. PT Arafah Mina, PT Mubina Fifa Mandiri dan Amana Berkah Mandiri, dibekukan izin operasionalnya selama satu tahun. Sementara PT Arafah Medina Jaya selama enam bulan.

Selama menjalani sanksi administratif tersebut * Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:47	15:08	17:42	18:53	04:32

Jumat, 11 Agustus 2023 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

DUGAAN SUAP LELANG JABATAN Ketua DPRD Pemalang Diperiksa KPK

JAKARTA (KR) - Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Tatang Kirana diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi suap jual beli jabatan (lelang jabatan) di lingkungan Pemkab Pemalang. Tatang diperiksa penyidik KPK di Mapolres Pemalang Jawa Tengah.

“Ketua DPRD Pemalang Tatang Kirana hadir saat diperiksa sebagai saksi. Penyidik mendalami pengetahuannya terkait dengan proses seleksi pengisian jabatan Sekwan di DPRD Pemalang,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (10/8).

Pemeriksaan terhadap Tatang yang dilakukan penyidik sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang Sodik Ismanto (SI). Pada hari yang sama, penyidik KPK juga memeriksa Kepala UPT Kebersihan Kabupaten Pemalang Noor Ali Sadikin dan sejumlah aparat sipil negara di * Bersambung hal 7 kol 3

E-RKAM, Terobosan Kemenag Mengelola Keuangan dan Administrasi Madrasah

JAKARTA (KR) - Di era teknologi digital, madrasah dituntut mampu meningkatkan tata kelola berbasis elektronik terutama pada tata kelola keuangan dan administrasi. Madrasah tidak lagi menggunakan laporan-laporan manual, dan disibukkan kerumitan administrasi yang membebankan, karena sudah hadir aplikasi yang menunjang tata kelola keuangan berbasis digital, yakni e-RKAM.

Proyek Madrasah Reform atau Realizing Education's Promise-Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) yang digulirkan Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, turut mendukung penyelenggaraan sistem elektronik perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (e-RKAM). Program yang ber-



Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Prof Ali Ramdhani (tengah).

KR-Istimewa

langsung tahun 2020 hingga 2025 ini ditujukan untuk semua Sekolah Dasar dan Menengah di bawah Kemenag yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengata-

kan, penyusunan rencana kerja dan anggaran akan berkualitas manakala didukung analisis hasil EDM yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). “Pengelola madrasah harus mampu mengalokasikan secara tepat sumber dana seperti BOS atau lainnya untuk kegiatan yang men-

dorong pencapaian SNP,” kata Dhani, sapaan akrabnya, di Jakarta, Rabu (20/8).

Melalui aplikasi EDM e-RKAM, lanjut Dhani, pemanfaatan semua dana bantuan dapat dipantau dengan baik di jenjang kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. “Sehingga

kualitas lembaga pendidikan dapat ditingkatkan seiring kenaikan kualitas perencanaan dan penganggaran,” terang Guru * Bersambung hal 7 kol 4



● SABTU 5 Agustus 2023 pagi, di Tamansari Yogyakarta ada antrian panjang orang-orang seperti antre mengambil bantuan sembako atau bantuan langsung tunai (BLT). Ternyata mereka warga sekitar yang antre buang sampah langsung di bak truk yang ada di tempat pembuangan sampah atau TPS. (Tanto, Patangpuluhan 598 Yogyakarta)-f

PROMO SPESIAL KEMERDEKAAN

Yuk Intip Si Kecil
dengan Pemeriksaan USG 4D

Rp 235.000

Fasilitas:
- Konsultasi Dokter Spesialis Obgyn
- USG 4D
- Print dan Soft File Hasil USG
- Informasi & Pendaftaran:
☎ 0811 8550 060